

## Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Gampong (Studi Kasus Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar)

### *The Influence of Transparency and Accountability on Village Fund Management (Case Study of Baitussalam District, Aceh Besar Regency)*

Ilya Safitri<sup>1)</sup>, Agustina<sup>2\*)</sup>

Manajemen Keuangan Sektor Publik, Politeknik Kutaraja<sup>1)</sup>, Analisis Keuangan, Politeknik Kutaraja<sup>2)</sup>

email: [IlyaSafitri00123@gmail.com](mailto:IlyaSafitri00123@gmail.com)<sup>1)</sup>, [agustina@poltekkutaraja.ac.id](mailto:agustina@poltekkutaraja.ac.id)<sup>2)</sup>

\*Correspondence

<p><b>Info Artikel</b></p> <p><i>Riwayat Artikel:</i> Diterima: 16 Mei 2025 Direvisi: 13 Juni 2025 Dipublikasikan: 30 Juni 2025</p> <p><i>Nomor DOI</i> 10.47647/jeko.v%vi%i.3079</p> <p><i>Cara Mensitasi :</i> Safitri., I., &amp; Agustina, A (2025) Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Gampong (Studi Kasus Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar), <i>Jurnal Ekobismen</i>, 5 (2), 173-189</p>	<p style="text-align: center;"><b>Abstrak</b></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana Gampong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif jenis penelitian asiatif kausal. Jumlah sampel dalam penelitian ini terdiri dari 48 responden yaitu aparatur desa dari 12 Gampong di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner. Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner pada seluruh responden. Teknik analisis yaitu pengujian instrumen (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, homogenitas, multikolinearitas, dan autokorelasi) dan uji hipotesis (uji t dan uji F). Hasil dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial dan simultan antara transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana Gampong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Transparansi, Akuntabilitas dan Pengelolaan Dana</p> <p style="text-align: center;"><b>Abstract</b></p> <p><i>This study aims to determine the effect of transparency and accountability on the management of village funds in Baitussalam District, Aceh Besar Regency. The method in this study is a quantitative approach of causal associative research type. The number of samples in this study consisted of 48 respondents, namely village officials from 12 villages in Baitussalam District, Aceh Besar Regency. The data source used is primary data in the form of questionnaires. Data collection techniques by distributing questionnaires to all respondents. Analysis techniques are instrument testing (validity and reliability tests), classical assumption tests (normality, homogeneity, multicollinearity, and autocorrelation tests) and hypothesis testing (t-test and F-test). The results and conclusions of the study indicate that there is a positive and significant influence partially and simultaneously between transparency and accountability on the management of village funds in Baitussalam District, Aceh Besar Regency.</i></p> <p><b>Keywords:</b> Transparency, Accountability and Fund Management</p>
---	--

## **PENDAHULUAN**

Desa adalah unit organisasi pemerintahan yang memiliki peran strategis dalam memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pelayanan publik. Untuk mendukung hal ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang berasal dari dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima (Pelu et al., 2023). Kebijakan ini semakin diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang bertujuan untuk memperkuat semangat otonomi daerah hingga tingkat pemerintahan desa. Dengan adanya undang-undang desa, desa diberikan keleluasaan lebih dalam perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan yang diambil. Meskipun banyak harapan positif yang muncul dari undang-undang desa ini, ada juga kekhawatiran bahwa jika pemerintah pusat dan daerah tidak menanggapi dengan baik konsekuensi dari undang-undang tersebut, akan muncul berbagai permasalahan.

Menurut Dakelan et al. (2016), perencanaan desa setelah diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 masih belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat desa. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengelola regulasi cenderung lebih fokus pada pengelolaan keuangan desa. Hal ini terlihat dari berbagai kendala yang dihadapi dalam tahap perencanaan desa, antara lain: penyusunan program kerja desa yang kurang didasarkan pada data kerentanan, perencanaan yang hanya berfokus pada kegiatan infrastruktur, waktu diskusi perencanaan yang tidak fleksibel, pedoman perencanaan yang hanya dianggap sebagai dokumen administratif, kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan, tidak adanya jadwal pasti untuk perencanaan pengembangan desa, stagnasi dalam pendidikan sosial dan politik terkait pendampingan perencanaan, kurangnya kepemimpinan, intervensi elit desa dalam proses perencanaan, serta kegagalan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menegakkan prinsip demokrasi di tingkat desa (Wibowo & Maharani, 2019).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar penting dalam pengelolaan Lembaga publik yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif. Pertanggungjawaban atas laporan yang diberikan oleh Lembaga desa yang merupakan hasil dari kinerja yang dilakukan selama periode yang telah dilaksanakan. Transparansi merupakan keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses data dan laporan keuangan pada desa tersebut. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa atas semua tindakan dan keputusan diambil oleh Lembaga publik dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban Lembaga untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan Tindakan yang dilakukan kepada pihak publik, dan ini semua mencakup penggunaan keuangan yang baik dan pengelolaan sumber daya yang efisien (Auditya et al., 2021).

Prinsip transparansi atau keterbukaan sendiri merupakan tindakan yang berhubungan dengan etika atau sikap dalam pengambilan keputusan. Transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan oleh aparatur/ pejabat desa yang dapat memberikan pengaruh baik bagi masyarakat desa. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010).

Akuntabilitas, Menurut Undang–Undang tentang Desa, yaitu pada Nomor 6 Tahun 2014 yang disahkan pada 15 Januari 2014 telah memberikan kesempatan bagi desa guna bisa mengurus

tata pemerintahannya sendiri dan melaksanakan pembangunan serta mendorong meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selain itu, dengan adanya peraturan tersebut maka sekarang ini pemerintah desa telah menjadi subjek pembangunan. Sehingga diharapkan pemerintah desa dapat lebih mandiri dalam melaksanakan kegiatan pengolahan sumber daya, keuangan, dan potensi yang dimiliki desa. Dengan banyaknya tugas yang dimiliki oleh desa tentu saja hal tersebut harus dibarengi dengan tanggungjawab yang besar pula. Pemerintahan desa wajib menerapkan beberapa prinsip seperti transparansi, partisipasi, keadilan, penegakan hukum, serta efektif dan efisien dalam tata pemerintahannya (Lusiana & Najamudin, 2023).

Transparansi dan akuntabilitas sebagai sesuatu hal yang sangat penting dan berguna serta bermanfaat untuk pengelolaan keuangan pada setiap organisasi atau lembaga. Transparansi (keterbukaan) didefinisikan sebagai upaya penyelenggaraan atau pelaksanaan organisasi atau lembaga secara terbuka dalam penyedia informasi yang mudah dipahami bagi pengguna kepentingan. Sedangkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) didefinisikan sebagai pemberi pertanggungjawaban kinerja serta kegiatan seorang pemimpin suatu organisasi sehingga pihak-pihak memiliki hak dan kewajiban dalam meminta pertanggungjawaban. Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas harus adanya pendukung dari sebuah sistem pengelolaan dan pelaporan serta pengawasan keuangan yang baik dan tepat supaya bisa mewujudkan informasi yang relevan dan mudah dipahami terhadap pelaksanaan kepentingan (Azizah & Andayani, 2022).

Tujuan dari dana desa adalah untuk meningkatkan layanan publik di desa, mengurangi kemiskinan, memajukan ekonomi desa, mengatasi ketimpangan pembangunan antar desa, serta memperkuat peran masyarakat desa sebagai aktor dalam pembangunan (Sugiharti & Hariani, 2021). Setiap kegiatan yang dibiayai oleh dana desa sebaiknya melalui serangkaian tahapan yang jelas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan tetap berpegang pada prinsip akuntabilitas. Selain itu, semua laporan yang disusun harus bersifat transparan dan dilengkapi dengan pengawasan yang baik agar dapat dipertanggungjawabkan (Putra & Henmaidi, 2023).

Akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan daerah diartikan sebagai tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan laporan mengenai pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dengan menggunakan media pertanggungjawaban yang dapat diukur baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa di Kajhu Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Penelitian ini mengidentifikasi adanya suatu kesenjangan empiris dalam pengujian hipotesis mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana gampong, khususnya di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Studi-studi sebelumnya belum secara komprehensif mengelaborasi dan memvalidasi signifikansi pengaruh individual dari transparansi (seperti keterbukaan informasi anggaran dan realisasi) maupun akuntabilitas (misalnya, mekanisme pelaporan dan pengawasan internal serta eksternal) terhadap peningkatan efisiensi, efektivitas, dan mitigasi risiko penyimpangan dalam pengelolaan dana gampong. Kesenjangan ini mengindikasikan urgensi untuk melakukan pengujian statistik yang lebih presisi guna mengkonfirmasi dan

mengkuantifikasi hubungan kausalitas antara setiap variabel independen dengan variabel dependen di wilayah studi tersebut.

### **Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana**

Transparansi merupakan suatu konsep yang mencerminkan keadaan yang nyata, jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, transparansi lebih ditekankan sebagai tindakan atau sikap yang diambil oleh individu atau kelompok terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan aktivitas yang mereka lakukan. Transparansi sangat penting dan seharusnya menjadi kewajiban di dalam institusi atau lembaga publik yang berhubungan dengan masyarakat luas. Praktik transparansi diperlukan sebagai bentuk pengawasan awal terhadap setiap tindakan yang telah atau akan diambil oleh institusi tersebut (Fahri, 2019). Dengan demikian, transparansi menciptakan kondisi di mana aturan dan alasan di balik setiap langkah pengaturan bersifat bebas, jelas, dan terbuka untuk diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah dalam melakukan transparansi ini harus memiliki sebuah sistem tata kelola yang menjadikan masyarakat sebagai pemeran utama, atau masyarakat sebagai customer seperti paradigma administrasi publik. Masyarakat yang harus dilayani, juga memiliki hak dalam mengetahui bagaimana pelaporan pemerintah yang ada. Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Daud et al. (2022) bahwa variabel Transparansi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Pengelolaan Dana Desa, hal ini dikarenakan sifat perencanaan, penyaluran, dan pelaporan seperti BLT-DD yang bersifat transparan serta melakukan musyawarah penentuan penerimaan bantuan dan pemanfaatan media papan informasi. Hasil temuan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Septian et al. (2022) mengatakan bahwa hubungan aparat desa dan masyarakat yaitu ketika masyarakat memberikan kepercayaan dalam pengelolaan keuangan desa serta segala aktivitas desa lainnya. Oleh sebab itu, pihak aparat desa diuntut agar selalu transparansi kepada masyarakatnya. Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$H_1$  : Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Keuangan

### **Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana**

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari padamemberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi) (Hanif et al., 2024). Tujuan akuntabilitas adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Syahputri et al., 2023). Kepercayaan publik yang tinggi akan pemerintah daerah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen pemerintah daerah. Menurut permendagri no. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran yaitu tahap perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil temuan penelitian Septian et al. (2022) mengatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti semakin akuntabel pengelolaan keuangan desa maka laporan yang dihasilkan akan lebih akurat. Karena akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu

yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik atau yang bersangkutan sesuai dengan yang di percayakan dan di pertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$H_2$  : Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Dana

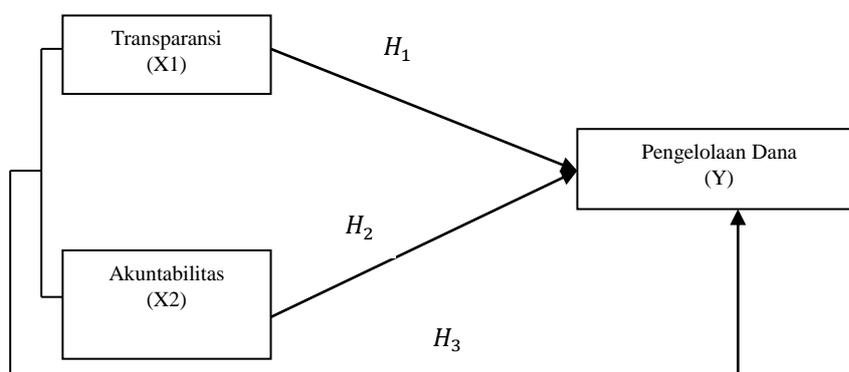
### Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana desa merupakan suatu proses yang meliputi tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Proses ini bertujuan untuk memanfaatkan dana yang dialokasikan untuk desa secara efektif, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa secara keseluruhan. Pengelolaan keuangan desa perlu diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang merupakan rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, APBDes harus bersifat transparan dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaannya. Hasil temuan yang dilakukan oleh Fitrianti & Sari (2024) bahwa adanya pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini berarti semakin transparan aktifitas pengelolaan keuangan desa maka hasil yang di dapatkan akan semakin baik. Sebagaimana pengertian dari transparansi yaitu keterbukaan pemerintah mengenai kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik bagi yang membutuhkan informasinya. Oleh sebabnya pemerintah atau aparat desa harus mampu dalam menyediakan informasi yang transparan mengenai aktivitas yang telah dilakukan desa. Selain itu, semakin akuntabel pengelolaan keuangan desa maka laporan yang di hasilkan akan lebih akurat. Karena akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik atau yang bersangkutan sesuai dengan yang di percayakan dan di pertanggungjawabkan. Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$H_3$  : Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Dana

Berikut ini merupakan kerangka konseptual yang dikaji dalam penelitian ini:

Gambar 1  
Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber: Dibuat Oleh Penulis (2025)

### METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi positivisme, digunakan

untuk mempelajari populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data melalui alat penelitian, analisis data statistik kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. yang telah dirumuskan sebelumnya. Populasi dalam penelitian adalah seluruh Aparatur Desa di Kecamatan Baitussalam yaitu desa Baet, Blang Krueng, Kajhu, Cot Paya, Klieng Cot Aron, Klieng Meuria, Labui, Lam Asan, Lambada Lhok, Lampineung, Lam Ujong, dan Miruk Lam Reudep. Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari semua jumlah populasi yang ada sebanyak 48 responden. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Jenis skala dalam dalam kuesioner menggunakan skala likert. Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel independen (transparansi dan akuntabilitas) dan variabel dependen (pengelolaan dana). Definisi operasional dalam penelitian ini dilakukan untuk menghindari agar tidak terjadi salah pengertian dalam menafsirkan judul, sehingga perlu membuat suatu batasan. Berikut ini definisi secara operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian.

**Tabel 1**  
**Definisi Operasional**

<b>No (1)</b>	<b>Variabel (2)</b>	<b>Definisi Variabel (3)</b>	<b>Indikator (4)</b>	<b>Skala Pengukuran (5)</b>	<b>Item Pertanyaan (6)</b>
1	Variabel (X <sub>1</sub> ): Transparansi	Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar (Rosalina & Wibawa, 2019)	Adapun indikator transparansi yaitu: (a) Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. (b) Aksesibilitas informasi keuangan oleh masyarakat (c) Kejelasan informasi yang disampaikan (d) Ketersediaan laporan penggunaan dana. (e) Ketepatan waktu pelaporan dana. (f) Partisipasi masyarakat dalam pengawasan (g) Pelibatan	Interval	1-7

No (1)	Variabel (2)	Definisi Variabel (3)	Indikator (4)	Skala Pengukuran (5)	Item Pertanyaan (6)
			masyarakat dalam musyawarah perencanaan.		
2	Variabel (X <sub>2</sub> ): Akuntabilitas	Akuntabilitas adalah tanggung jawab individu atau organisasi untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan memberikan laporan mengenai tindakan, keputusan, dan hasil yang dicapai (Sabili et al., 2023)	Indikator akuntabilitas diantaranya: (a) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program. (b) Kejelasan tugas dan tanggung jawab. (c) Evaluasi hasil kegiatan. (d) Pelaporan hasil program secara terbuka. (e) Kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. (f) Kemampuan menjelaskan penggunaan dana. (g) Tindak lanjut atas hasil pengawasan.	Interval	8-14
4	Variabel (Y): Pengelolaan dana	Pengelolaan dana desa adalah serangkaian langkah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penggunaan dana yang diberikan kepala desa (Zulaifah & Marwata, 2020)	(a) Perencanaan kegiatan berbasis kebutuhan masyarakat. (b) Pelaksanaan kegiatan sesuai rencana. (c) Keterlibatan masyarakat dalam	Interval	15-21

No (1)	Variabel (2)	Definisi Variabel (3)	Indikator (4)	Skala Pengukuran (5)	Item Pertanyaan (6)
			pelaksanaan (d)Pengawasan secara partisipatif. (e)Evaluasi kegiatan secara berkala. (f)Pelaporan keuangan yang akurat. (g)Transparansi dalam penggunaan dana		

Sumber: Dibuat Oleh Penulis (2025)

Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner pada semua responden. Teknik analisis data melakukan pengujian instrumen (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi), uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis (uji t dan uji F). Tahapan selanjutnya, melakukan analisis jalur secara langsung bertujuan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan tersebut. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar perubahan pada variabel dependen yang disebabkan oleh perubahan pada variabel independen. Aplikasi yang digunakan untuk analisis data yaitu software SPSS versi 22.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahapan awal melakukan analisis pengujian instrumen terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas instrumen dilakukan melalui uji signifikansi dengan membandingkan antara nilai  $r_{hitung}$  dengan nilai  $r_{tabel}$ . Adapun untuk *degree of freedom* (df) = n-2, sehingga n adalah jumlah sampel. Jadi, pada kasus ini besarnya df dapat dihitung 48-2 atau df = 46 dengan  $\alpha = 0,05$  maka didapat  $r_{tabel}$  0,2845 jika  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$  dan nilai r positif, maka butir pernyataan tersebut dikatakan valid. Adapun hasil analisis uji validitas maka dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas**

No	Pernyataan	Koefesien Korelasi		Probabilitas	Keterangan
		$r_{hitung}$	$r_{tabel}$		
<b>Transparansi (X1)</b>					
1	X1.1	0,496	0,2845	0,000 < 0,05	Valid
2	X1.2	0,713	0,2845	0,000 < 0,05	Valid
3	X1.3	0,704	0,2845	0,000 < 0,05	Valid
4	X1.4	0,646	0,2845	0,000 < 0,05	Valid
5	X1.5	0,766	0,2845	0,000 < 0,05	Valid

No	Pernyataan	Koefisien Korelasi		Probabilitas	Keterangan
		$r_{hitung}$	$r_{tabel}$		
6	X1.6	0,852	0,2845	0,000 < 0,05	Valid
7	X1.7	0,701	0,2845	0,000 < 0,05	Valid
<b>Akuntabilitas (X2)</b>					
8	X2.1	0,785	0,2845	0,000 < 0,05	Valid
9	X2.2	0,627	0,2845	0,000 < 0,05	Valid
10	X2.3	0,808	0,2845	0,000 < 0,05	Valid
11	X2.4	0,780	0,2845	0,000 < 0,05	Valid
12	X2.5	0,809	0,2845	0,000 < 0,05	Valid
13	X2.6	0,730	0,2845	0,000 < 0,05	Valid
14	X2.7	0,328	0,2845	0,023 < 0,05	Valid
<b>Pengelolaan Dana (Y)</b>					
15	Y1	0,816	0,2845	0,000 < 0,05	Valid
16	Y2	0,857	0,2845	0,000 < 0,05	Valid
17	Y3	0,855	0,2845	0,000 < 0,05	Valid
18	Y4	0,736	0,2845	0,000 < 0,05	Valid
19	Y5	0,665	0,2845	0,000 < 0,05	Valid
20	Y6	0,744	0,2845	0,000 < 0,05	Valid
21	Y7	0,762	0,2845	0,000 < 0,05	Valid

Sumber: Data Diolah 2025(SPSS Versi 22)

Dari hasil perhitungan koefisien korelasi seluruhnya mempunyai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Dengan probabilitas yang ditetapkan sebesar 0,05, hasil perhitungan probabilitas seluruhnya menunjukkan probabilitas yang dihitung < probabilitas yang ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada instrumen dapat dinyatakan valid atau layak digunakan sebagai alat untuk mengukur penelitian. Artinya semua pernyataan yang dicantumkan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan variabel pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana gampong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

Uji Reliabilitas instrumen dapat dilihat dari besarnya nilai *cronbach* alpha pada masing-masing variabel. *Cronbach* alpha digunakan untuk mengetahui reliabilitas konsisten item atau menguji kekonsistenan responden dalam merespon seluruh item. Instrumen untuk mengukur masing-masing variabel dikatakan reliabel jika memiliki *cronbach* alpha > 0,60. Hasil analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS Versi-22.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Transparansi (X <sub>1</sub> )	7	0,823	Reliabel
Akuntabilitas (X <sub>2</sub> )	7	0,809	Reliabel
Pengelolaan Dana (Y)	7	0,879	Reliabel

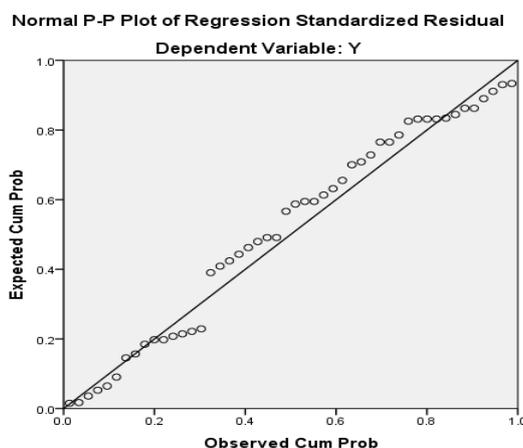
Sumber: Data Diolah 2025 (SPSS Versi 22)

Tabel 3 menunjukkan hasil analisis uji reliabilitas semua variabel yaitu X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, dan Y, menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Hal ini dapat disimpulkan bahwa bahwa semua instrumen dalam penelitian ini reliabel atau handal. Artinya, setiap pernyataan dalam kuesioner dapat dinyatakan reliabel. Setelah data valid dan reliabel, maka tahapan selanjutnya melakukan

analisis uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui atau menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear berganda terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Masalah-masalah dalam uji asumsi klasik dalam penelitian ini dianalisis pada dua tahapan yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah nilai residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak atau variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Normalitas data dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik normal P-Plot atau dengan melihat histogram dari residualnya. Uji normalitas residual adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Adapun sebaran plotnya lihat pada Gambar 2.

**Gambar 2**  
**Uji Normalitas**



Sumber: *Sumber: Data Diolah 2025 (SPSS Versi 22)*

Gambar 2 menunjukkan hasil uji normalitas *probability plot* berdistribusi normal. Hasil yang diperoleh sesuai dengan dasar pengambilan keputusan bahwa data atau titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini membuktikan bahwa hasil pengujian normalitas menggambarkan data normal. Artinya dapat dilanjutkan untuk pengujian regresi dan uji hipotesis. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model dalam regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Jadi hasil analisis data uji multikolinearitas dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel Independen	Toleransi	VIF	Keterangan
Transparansi ( $X_1$ )	0,206	4,851	Non Multikolinieritas
Akuntabilitas ( $X_2$ )	0,206	4,851	Non Multikolinieritas

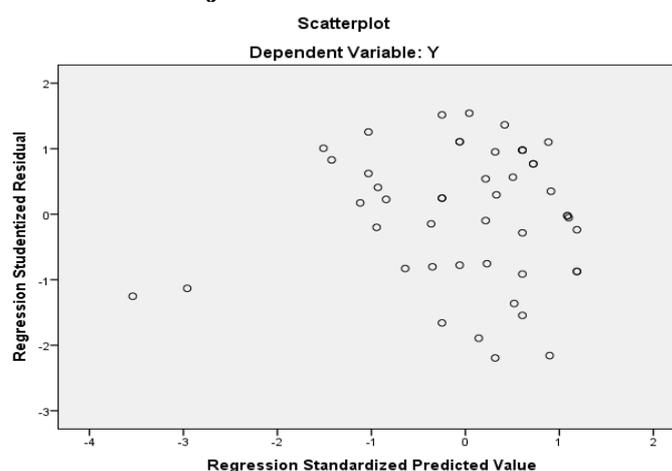
*Sumber: Data Diolah 2025 (SPSS Versi 22)*

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa setiap variabel *independen* memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat hubungan multikolinieritas antar *independen*.

Artinya, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel yang diukur terbebas dari asumsi klasik multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi memiliki variansi yang sama (homoskedastisitas) dari residual satu ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat dikatakan valid atau terpenuhi apabila berada di bawah 5%. Apabila asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid sebagai alat peramalan. Oleh karena itu, salah satu persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Pengujian uji heteroskedastisitas dalam kajian penelitian ini menggunakan *scatterplot*. Adapun hasil uji heteroskedastisitas *scatterplot* dapat dilihat pada Gambar 3.

**Gambar 3**  
**Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Data Diolah 2025 (SPSS Versi 22)

Dari gambar di atas, terlihat titik-titik pada Grafik Scatterplot menyebar atau tidak membentuk pola tertentu. Selain itu, tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan, sehingga model regresi layak dipakai dalam penelitian. Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi autokolerasi maka dinamakan ada problem autokolerasi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Model korelasi yang baik adalah korelasi yang bebas dari autokorelasi. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Durbin-Watson (DW). Jika nilai DW di antara nilai  $dU$  hingga  $(4 - dU)$ , berarti tidak terjadi outokorelasi. Adapun hasil uji autokoralasi dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5**  
**Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.903 <sup>a</sup>	.815	.807	1.61501	2.277

Sumber: Data Diolah 2025 (SPSS Versi 22)

Berdasarkan Tabel 5 hasil uji autokorelasi memperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,729. Untuk mengetahui apakah terjadinya autokorelasi atau tidak, maka lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson**

N	D	DL	DU	4-DL	4-DU
48	2,277	1,450	1,623	2,550	2,377

Sumber: Data Diolah 2025 (SPSS Versi 22)

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil analisis uji autokorelasi Durbin Watson diperoleh  $du < d < 4 - du$ , berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif dan keputusannya tidak ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa syarat dalam uji asumsi klasik sudah terpenuhi. Apabila data regresi terjadi autokorelasi maka dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya; karena manipulasi data, tidak memasukkan peubah (variabel) yang berpengaruh, atau karena kesalahan model.

Model regresi linier berganda merupakan model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas (X). Jika ada lebih dari satu variabel bebas untuk mengestimasi nilai Y, persamaan tingkat pertama persamaan disebut permukaan regresi (*regression surface*). Perhitungan nilai koefisien regresi dilakukan dengan menyelesaikan solusi sistem. Model yang digunakan untuk menduga pengaruh tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini.

**Tabel 7**  
**Hasil Analisis Uji regresi Linear Berganda**

Variabel	Unstandardized Coefficients (B)
Konstan	1,068
Transparansi (X <sub>1</sub> )	0,625
Akuntabilitas (X <sub>2</sub> )	0,336

Sumber: Data Diolah 2025 (SPSS Versi 22)

Persamaan regresi berganda berikut ini diperoleh dari analisis SPSS yang ditunjukkan pada tabel 6:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 1,068 + 0,625X_1 + 0,336X_2 + e$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diketahui hasil penelitian yaitu:

- Berdasarkan persamaan di atas, nilai konstanta sebesar 1,068. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel-variabel *independen* diasumsikan dalam keadaan tetap, maka variabel pengelolaan dana gampong meningkat sebesar 1,068 satuan.
- Transparansi (X<sub>1</sub>) bernilai 0,625 yang berarti jika transparansi mengalami kenaikan 1 satuan, maka pengelolaan dana juga meningkat sebesar 0,625 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.

- c. Akuntabilitas ( $X_2$ ) bernilai 0,336 yang berarti jika akuntabilitas mengalami kenaikan 1 satuan, maka pengelolaan dana akan mengalami kenaikan sebesar 0,336 satuan dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan.

Tahapan selanjutnya melakukan uji hipotesis penelitian yaitu uji F dan uji t. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas (transparansi dan akuntabilitas) yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (pengelolaan dana). Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

**Tabel 8**  
**Hasil Analisis Uji F**

Variabel	F	P Value
Transparansi ( $X_1$ )	99,001	0,000
Akuntabilitas ( $X_2$ )		

Sumber: Data Diolah 2025 (SPSS Versi 22)

Berdasarkan Tabel 8 pengujian hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh secara simultan (keseluruhan) transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana. Hasil analisis menunjukkan nilai  $p$  value  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara transparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan dana gampong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Labangu et al. (2022) bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dan desa, karena Pemerintah Desa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dimana pemerintah desa lebih terbuka kepada masyarakat dengan memberikan informasi dan melibatkan masyarakat terkait dengan perencanaan pengelolaan alokasi dana desa.

Uji signifikansi secara parsial digunakan untuk melihat pengaruh tiap-tiap variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependennya. Kriteria pengujianya apabila nilai signifikansi  $< 0,05$  dan atau jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka model regresi signifikan secara statistik dan dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak Kurniawan, (2016). Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini:

**Tabel 9**  
**Hasil Uji t (Uji Parsial)**

Variabel	t	P value
Transparansi ( $X_1$ )	4,377	0,000
Akuntabilitas ( $X_2$ )	2,172	0,035

Sumber: Data Diolah 2025 (SPSS Versi 22)

- a.  $H_1$ : Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana gampong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa nilai variabel  $t_{hitung}$  sebesar  $4,377 > 2,014$ , dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < \alpha 0,05$ . Artinya transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana gampong, dengan demikian hipotesis diterima.
- b.  $H_2$ : Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana gampong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa nilai variabel  $t_{hitung}$  sebesar  $2,172 > 2,014$ , dengan nilai signifikansi sebesar  $0,035 < \alpha 0,05$ . Artinya

akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana gampong, dengan demikian hipotesis diterima. Koefisien determinasi (*R-squared* atau *R<sup>2</sup>*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variansi variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 10.

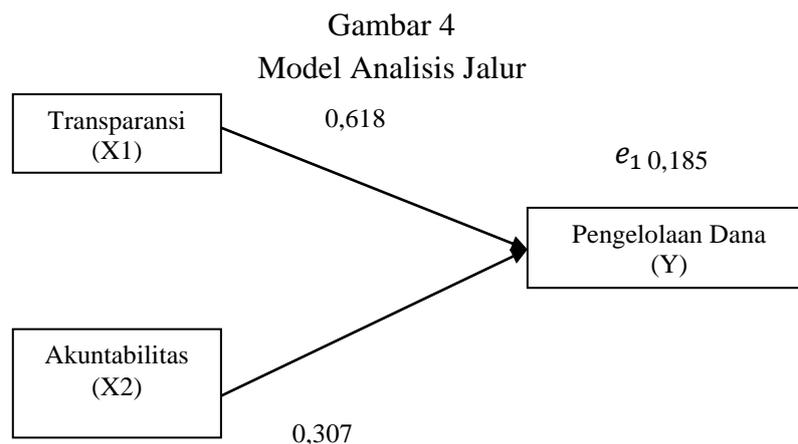
**Tabel 10**  
**Hasil Koefisien Determinasi (*R<sup>2</sup>*)**

Variabel	<i>R</i>	<i>R<sup>2</sup></i>
Transparansi ( <i>X<sub>1</sub></i> )	0,903	0,815
Akuntabilitas ( <i>X<sub>2</sub></i> )		

Sumber: Data Diolah 2025 (SPSS Versi 22)

Tabel 10 menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan (*R*) sebesar 0,903. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel bebas (transparansi dan akuntabilitas) terhadap variabel terikat (pengelolaan dana) adalah 90,3% namun sisanya 9,7% dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki keterkaitan terhadap pengelolaan dana Gampong Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Laoli (2019) bahwa akuntabilitas memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Peningkatan akuntabilitas akan mendorong hasil kinerja anggaran yang lebih ekonomis, efisien, dan efektif.

Tahapan selanjtnyam mengetahui model analisis jalurnya. Secara teori, model analisis jalur (path analysis) adalah teknik statistik multivariat yang digunakan untuk menguji dan mengevaluasi hubungan sebab akibat (kausalitas) antara variabel-variabel dalam suatu model. Model ini bertujuan untuk melihat pengaruh langsung maupun tidak langsung dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam konteks penelitian ini, model analisis jalur bertujuan memahami bagaimana variabel Transparansi (*X<sub>1</sub>*) dan Akuntabilitas (*X<sub>2</sub>*) secara simultan maupun parsial memengaruhi variabel Pengelolaan Dana Gampong (*Y*). Berikut ini merupakan model analisis jalur yang dikaji dalam penelitian ini:



Sumber: Data Diolah 2025 (SPSS Versi 22)

Berdasarkan gambar 4 menunjukkan bahwa variabel transparansi (*X<sub>1</sub>*) memberikan pengaruh langsung terhadap variabel pengelolaan dana sebesar 0,618, sedangkan variabel akuntabilitas memberikan pengaruh langsung terhadap variabel pengelolaan dana sebesar 0,307. Hal ini membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara positif dan signifikan

berkontribusi terhadap peningkatan Pengelolaan Dana Gampong di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Besarnya koefisien jalur menunjukkan bahwa Transparansi ( $X_1$ ) memiliki pengaruh langsung yang lebih kuat terhadap Pengelolaan Dana dibandingkan dengan Akuntabilitas ( $X_2$ ). Dengan kata lain, keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana gampong memiliki dampak yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas pengelolaannya dibandingkan dengan sekadar adanya mekanisme pertanggungjawaban.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan latar belakang, pengujian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi ( $X_1$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana Gampong ( $Y$ ), artinya, semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi dalam proses pengelolaan dana Gampong, maka pengelolaan dana tersebut menjadi lebih baik. Hal ini karena transparansi membantu masyarakat dan pihak terkait untuk memantau penggunaan dana sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, transparansi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penggunaan dana Gampong, sehingga pengelolaan dana menjadi lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat memberikan masukan serta mengawasi jalannya penggunaan dana, yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas perangkat Gampong dalam melaksanakan pengelolaan dana secara efektif dan efisien.

Akuntabilitas ( $X_2$ ) juga berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana Gampong ( $Y$ ). Meskipun bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan, akuntabilitas memberikan kerangka kerja pertanggungjawaban yang jelas, sehingga penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat. Selain itu, variabel akuntabilitas juga berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana Gampong, yang menunjukkan bahwa semakin baik mekanisme pertanggungjawaban yang diterapkan, maka pengelolaan dana Gampong akan semakin optimal. Akuntabilitas memberikan kerangka kerja yang jelas dalam penggunaan dan pelaporan dana, sehingga setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini tidak hanya membantu dalam pengendalian internal, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana, sehingga mencegah terjadinya penyelewengan. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama menjadi pilar penting dalam menciptakan pengelolaan dana Gampong yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kemudian secara bersama-sama, transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana Gampong. Kombinasi transparansi dan akuntabilitas menciptakan sistem pengelolaan dana yang kuat, akuntabel, dan efisien. Transparansi menyediakan keterbukaan informasi kepada masyarakat, sementara akuntabilitas memastikan adanya pertanggungjawaban atas penggunaan dana. Kedua variabel ini saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola dana Gampong yang baik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana Gampong. Implikasi dari temuan ini adalah: Penelitian ini memperkuat pentingnya peningkatan transparansi melalui penyediaan informasi publik terkait pengelolaan dana Gampong secara terbuka, misalnya dengan papan informasi desa atau media online agar masyarakat mudah mengakses informasi penggunaan dana.

Masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam mengawasi dan memberikan masukan terkait penggunaan dana Gampong, sehingga mendorong penggunaan dana yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan terkait pengelolaan dana Gampong yang lebih transparan dan akuntabel, seperti penyusunan SOP pelaporan dana, mekanisme pengawasan partisipatif, serta peningkatan kapasitas aparatur Gampong. Penelitian ini menambah literatur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana Gampong, khususnya di Kecamatan Baitussalam, dan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lanjutan dalam bidang akuntansi sektor publik dan tata kelola pemerintahan desa.

Selanjutnya saran penelitian selanjutnya dianjurkan untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat secara rutin, baik melalui pertemuan langsung maupun media informasi, serta melakukan pelaporan dana secara transparan agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Perangkat Gampong perlu meningkatkan akuntabilitas melalui pelaporan yang jelas, akurat, dan tepat waktu, serta melakukan dokumentasi penggunaan dana dengan rapi agar memudahkan proses audit dan evaluasi. Perlu adanya pelatihan dan pendampingan bagi aparatur Gampong terkait pengelolaan keuangan desa, transparansi, dan akuntabilitas agar mereka mampu menjalankan pengelolaan dana dengan lebih profesional dan sesuai regulasi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2021). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21–42. <https://doi.org/10.33369/fairness.v3i1.15274>
- Azizah, W., & Andayani. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 11(10), 133–139. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i1.33246>
- Dakelan, Huda, M., Haris, A. M., & Dahlan, A. (2016). *Mewujudkan Desa Inklusif*. Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Daud, R. M., Yulia, A., & Mauliza, R. (2022). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Bireuen. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 133–143.
- Fahri, M. (2019). Analisis Transparansi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bone. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 3(1), 14–29. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v3i1.189>
- Fitrianti, M., & Sari, V. F. (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(1), 206–218. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1114>
- Hanif, M., Nurdin, R., & Syahputra, H. (2024). Akuntabilitas Perencanaan dan Tata Kelola Anggaran (Studi Kasus Pada Pembangunan Mesjid Agung Al Falah Sigli ). *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari*, 9(2), 106–121.
- Kurniawan, R. (2016). *Analisis Regresi*. Kencana Prenada Media.
- Labangu, Y. L., Anto, L. O., & Nurhayati. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Pada Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 7(2), 223–235.
- Laoli, V. (2019). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value of Money pada Pemerintah Kabupaten Nias. *Owner*, 3(1), 91. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.108>
- Lusiana, N., & Najamudin, N. (2023). Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Tata

- Kelola Pemerintahan di Desa Bumi Sari. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(2), 304–316. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v5i2.5040>
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Pelu, A., Madubun, J., & Wance, M. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah. *Journal of Government Science Studies*, 2(2), 124–139. <https://doi.org/10.30598/jgssvol2issue2page124-139>
- Putra, E. A., & Henmaidi. (2023). Analisis Perilaku Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pencegahan Fraud Di Kabupaten Pasaman. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(4), 1588–1598. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1388>
- Rosalina, E., & Wibawa, D. P. (2019). Analisa transparansi pengelolaan dana desa di lima desa Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. *IJAB: Indonesian Journal of Accounting and Business*, 1(1), 33–45. <https://doi.org/10.33019/ijab.v1i1.8>
- Sabili, F., Romansyah, D., & Hidayat, R. (2023). Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 11(2), 233–249. <https://doi.org/10.35836/jakis.v11i2.626>
- Septian, R. L., Wawo, A., & Jannah, R. (2022). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Sifat Amanah Sebagai Variabel Moderasi. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2), 179–193. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i2.25485>
- Sugiharti, C. A., & Hariani, S. (2021). Dampak Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 6(1), 11–18. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syahputri, D. A., Nst, Y. S. J., & Nurwani, N. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *KITABAH: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan ...*, 7(1), 17–34.
- Wibowo, F. A., & Maharani, A. E. P. (2019). Optimalisasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembuatan Produk Hukum Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Journal Publica*, 3(3), 1–19. [http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZOtx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&p;id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS\\_](http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-84865607390&partnerID=tZOtx3y1%0Ahttp://books.google.com/books?hl=en&lr=&p;id=2LIMMD9FVXkC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Principles+of+Digital+Image+Processing+fundamental+techniques&ots=HjrHeuS_)
- Zulaifah, I. A., & Marwata. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 636-275.